ANALISIS DAMPAK KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF TERHADAP PERIZINAN UMKM DI KOTA KOTA BESAR DI INDONESIA

Aulia Dian Hidayati¹, Dina Mukti Yatulloh², Moh. Imam Gusthomi³

12auliaadiann@students.unnes.ac.id¹, dinamuktii64@students.unnes.ac.id²,

moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id³

Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Dampak Keputusan Fiktif Positif terhadap Proses Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota-Kota Besar Indonesia". Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia, yang menjadi pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, UMKM seringkali dihadapkan pada hambatan berupa proses perizinan yang lambat, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya kepastian hukum. Sebagai solusi, pemerintah memperkenalkan prinsip "fiktif positif" untuk mempercepat pelayanan publik dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan prinsip fiktif positif dalam proses perizinan UMKM di kota-kota besar. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip fiktif positif membantu mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengawasan yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan serta risiko ketidakpastian hukum. Kesimpulannya, agar keputusan fiktif positif dapat memberikan manfaat optimal, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku UMKM, serta reformasi birokrasi yang mendukung perizinan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Fiktif Positif, Perizinan, UMKM.

ABSTRACT

This research is titled "Analysis of the Impact of Positive Fictitious Decisions on the Licensing Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Major Cities in Indonesia". The background of this study is based on the crucial role of UMKM in Indonesia's economy, serving as a key driver in job creation and contributing significantly to the Gross Domestic Product (GDP). However, UMKM often face challenges such as slow licensing processes, complex bureaucracy, and a lack of legal certainty. As a solution, the government introduced the "positive fictitious" principle to accelerate public services and create a more conducive business environment for UMKM. This research aims to examine the impact of the application of the positive fictitious principle in the UMKM licensing process in major cities. The method used is a normative juridical approach, utilizing document studies and in-depth interviews. The results show that the positive fictitious principle helps speed up the licensing process and increases legal certainty for business actors. Nevertheless, there are some challenges, such as insufficient oversight, which may lead to misuse, as well as risks of legal uncertainty. In conclusion, to optimize the benefits of the positive fictitious decision, there is a need for enhanced oversight, broader socialization to UMKM actors, and bureaucratic reform to support transparent and accountable licensing processes.

Keywords: Fictitious Positive, Licensing, UMKM.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi sekitar 280 juta jiwa. Dalam upaya memperkuat perekonomian, Indonesia aktif mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM sebagai bagian integral dari strategi

pembangunan ekonomi. UMKM berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian di Indonesia mengingat dengan banyaknya jumlah penduduk tak sebanding dengan kurangnya lapangan pekerjaan. Sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk berusaha sendiri untuk mencari pendapatan. UMKM memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan perusahaan besar. Salah satunya adalah kemampuan untuk berinovasi dengan cepat dalam pengembangan produk, yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar. Selain itu, modal yang diperlukan untuk memulai dan mengelola UMKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam dunia usaha. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, UMKM dapat menciptakan kemandirian ekonomi di komunitas mereka.

Selain berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, UMKM juga memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi dinamika pasar. Hal ini berbeda dengan perusahaan besar yang sering terjebak dalam struktur birokrasi yang kaku. Kemampuan manajerial yang lebih dinamis dan semangat kewirausahaan yang kuat membuat UMKM lebih responsif terhadap peluang dan tantangan yang ada. UMKM tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal. Usaha ini dapat dijalankan dengan mudah oleh masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam masyarakat. Sebagai tambahan, keberadaan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, menjadikannya sebagai alat yang efektif untuk pemerataan ekonomi. Sektor ini juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menjadi pilar pertumbuhan ekonomi, dan membantu mewujudkan stabilitas nasional. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat, UMKM dapat terus berkembang dan memainkan peran krusial dalam memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.

Meskipun sektor UMKM memiliki berbagai keunggulan, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan usahanya. Beberapa masalah yang umum ditemui meliputi kesulitan dalam mendapatkan perizinan usaha, akses terbatas terhadap modal, kurangnya penguasaan teknologi, sulitnya mendapatkan informasi pasar, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang relatif rendah. Selain itu, iklim usaha yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi kendala. Di era globalisasi, keterbukaan pasar dan liberalisasi ekonomi semakin memperberat tantangan bagi perkembangan UMKM. Bank Indonesia mencatat bahwa sektor UMKM menghadapi berbagai masalah, termasuk kesulitan dalam memperoleh izin, kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan, ketidakpastian dalam waktu dan jumlah kredit yang didapatkan, serta kurangnya keterampilan tenaga kerja di sektor ini. Tantangan ini semakin memburuk dengan kondisi globalisasi dan liberalisasi yang membuat UMKM sulit untuk beradaptasi dan berkembang secara optimal.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, UMKM perlu meningkatkan kualitas produksi melalui inovasi dan kreativitas agar tetap dapat bersaing. Mereka juga dituntut untuk mempertahankan standar dan kualitas produk agar dapat diterima di pasar global. Persaingan yang ketat, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, telah mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah pemberdayaan dan perlindungan guna memajukan serta memberdayakan UMKM. Untuk menyelesaikan masalah di sektor UMKM, diperlukan usaha pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM, terutama di tengah era globalisasi yang semakin terbuka. Pemberdayaan dan perlindungan ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM dengan menyederhanakan proses perizinan usaha, sehingga berkontribusi pada terciptanya negara yang sejahtera. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memberikan kemudahan

perizinan dan perlindungan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks globalisasi, kepastian hukum dan kepastian dalam berusaha menjadi aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas layanan publik, termasuk kecepatan dan akurasi dalam administrasi, merupakan syarat utama untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Sistem hukum di Indonesia telah mengadopsi prinsip "diam berarti setuju," yang dikenal sebagai "fiktif positif." Implementasi prinsip ini dalam layanan publik di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan akan instrumen hukum yang mendukung praktik tata kelola yang baik, yang menjadi salah satu tuntutan dalam era globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi mendorong reformasi dalam administrasi pemerintahan untuk mencapai pengelolaan yang baik. Prosedur yang panjang dan rumit sering kali menjadi penghalang bagi pelaku usaha dalam memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan izin. Selain memangkas prosedur melalui deregulasi dan debirokratisasi, penerapan prinsip fiktif positif juga memberikan waktu yang jelas serta kepastian dalam proses pengajuan berbagai izin yang berkaitan dengan aspek hukum.

Menyadari betapa pentingnya kemudahan dalam perizinan, pemerintah telah melakukan restrukturisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satu inisiatif yang diambil adalah pengenalan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission—OSS). Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah memberikan sejumlah kemudahan bagi para pelaku usaha dalam proses pendaftaran dan pengurusan penerbitan Izin Usaha serta Izin Komersial dan/atau Operasional. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengintegrasikan layanan administrasi serta mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan, mengingat pelaku usaha sangat memerlukan pelayanan administrasi yang cepat dan efisien.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, berfungsi sebagai tulang punggung yang tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) tetapi juga dalam pembukaan peluang kerja yang lebih banyak. Oleh karena itu, memahami dampak dari keputusan fiktif positif terhadap proses perizinan UMKM menjadi sangat krusial untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini. Meskipun keputusan fiktif positif berpotensi mempercepat proses perizinan, hal ini juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari keputusan tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem hukum yang ada, penting untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan terpercaya.

Dalam konteks perubahan regulasi yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja, kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas ketentuan yang berkaitan dengan keputusan fiktif positif menjadi semakin mendesak. Hal ini penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat responsif tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata para pelaku usaha. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan, serta menghasilkan peraturan yang lebih fleksibel dan mendukung pengembangan UMKM. Reformasi regulasi yang tepat dapat mengurangi hambatan dalam proses perizinan dan membantu UMKM beroperasi dengan lebih efisien, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat, UMKM dapat terus berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi nasional dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang menggunakan fakta-fakta dari perilaku individu atau masyarakat dalam pandangan hukum serta didukung dengan studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan sumber data lain untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak Keputusan Fiktif Positif terhadap proses perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota-kota besar Indonesia. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman dan pandangan para pelaku UMKM serta pihak terkait mengenai implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan penggalian data secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan, serta analisis dokumen dan regulasi yang relevan untuk memahami konteks hukum dan kebijakan yang mempengaruhi perizinan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, pejabat pemerintah, dan ahli hukum, serta data sekunder dari kajian pustaka yang mencakup literatur, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian sebelumnya terkait UMKM dan perizinan di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung terhadap proses perizinan, dan pengumpulan dokumen resmi terkait kebijakan keputusan fiktif positif. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mencakup transkrip wawancara, kategorisasi data berdasarkan tema yang muncul, analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama, serta analisis hukum untuk menilai regulasi keputusan fiktif positif dan implikasinya terhadap praktik hukum. Mekanisme analisis masalah hukum dilakukan dengan mengidentifikasi isu hukum yang muncul dari penerapan keputusan fiktif positif, membandingkan regulasi dengan praktik di lapangan, serta menilai dampak keputusan fiktif positif terhadap hak-hak pelaku UMKM dan potensi konflik hukum yang mungkin timbul. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran jelas mengenai dampak Keputusan Fiktif Positif terhadap proses perizinan UMKM serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Keputusan Fiktif Positif Terhadap Proses Perizinan UMKM di Kota Kota Besar di Indonesia

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum untuk mempermudah proses bisnis. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang mendukung kelancaran perekonomian nasional. Salah satu aspek penting dalam mempermudah usaha adalah penerapan prinsip fiktif positif, terutama dalam pengurusan izin. Pengajuan izin usaha melibatkan sekitar 13 langkah yang harus dilalui. Di era globalisasi saat ini, kepastian hukum dan kepastian dalam berbisnis menjadi faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan administrasi, sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung. Dalam hukum administrasi modern di Indonesia, prinsip fiktif positif diterapkan. Ini berarti bahwa jika otoritas pemerintah tidak menangani permohonan dengan baik seperti mengabaikan, memberikan layanan yang kurang memadai, atau memperlambat proses, permohonan tersebut akan dianggap secara otomatis disetujui.

Penerapan prinsip fiktif positif dalam berbagai kebijakan legislasi negara telah membawa manfaat dalam mempercepat dan mempermudah proses perizinan serta penerbitan keputusan yang diajukan oleh masyarakat kepada lembaga administrasi. Prinsip "fiktif positif" merujuk pada kondisi di mana administrasi pemerintah tidak memberikan

respon atau layanan yang seharusnya terkait dengan permohonan dari masyarakat (Simanjuntak, E. 2021). Ini mengindikasikan adanya keterlambatan atau kurangnya respons dari pihak administrasi. Menurut Pasal 53 UUAP ayat (3), jika Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak mengambil keputusan atau tindakan dalam periode yang ditentukan pada ayat (2), yaitu 10 hari, maka permohonan tersebut dianggap diterima secara hukum. Ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan keputusan yang mengakui penerimaan permohonan tersebut, dan pengadilan wajib memberikan putusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja setelah permohonan diajukan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tidak menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang harus diambil jika surat keputusan tidak diterbitkan dengan segera. Dokumen tersebut hanya menyatakan bahwa setelah permohonan disampaikan, permohonan itu dianggap memenuhi syarat, dan perizinan secara otomatis dianggap disetujui, tanpa memberikan opsi bagi pemohon untuk mengajukan permohonan keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebaliknya, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, yang mengesahkan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan cara yang lebih efisien. Undang-Undang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law, bertujuan untuk menyederhanakan regulasi. Metode Omnibus Law mengintegrasikan berbagai tema, materi, dan aturan dari sektor-sektor yang berbeda ke dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan undang-undang yang mampu mengharmonisasi regulasi lain yang sebelumnya saling tumpang tindih dan menghambat kemudahan dalam berusaha

Pandangan terkait keputusan fiktif positif telah mengalami perubahan akibat UUCK yang tercantum dalam Pasal 175 angka (7), yang merevisi Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014. Dalam revisi ini, waktu yang diberikan untuk memenuhi permohonan, yang sebelumnya 10 hari, kini dipangkas menjadi 5 hari. Pasal 3 mengatur bahwa jika permohonan diajukan secara daring dan semua syarat dipenuhi, sistem akan secara otomatis menghasilkan Keputusan atau Tindakan yang dianggap sebagai Keputusan atau Tindakan dari instansi atau pejabat pemerintah yang bersangkutan. Selain itu, pengajuan permohonan untuk memperoleh bukti fisik atau tindakan pemerintah tidak lagi bisa dilakukan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Perpu Cipta Kerja. Peraturan Presiden akan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai tindakan konkret atau bukti fisik yang berhubungan dengan keputusan fiktif positif tersebut.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang terencana dan terintegrasi dalam membangun ekonomi yang berbasis kemandirian masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berfungsi sebagai pilar utama dalam penyerapan tenaga kerja di seluruh wilayah. Sektor UMKM sangat vital karena tidak memerlukan modal yang besar dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat, sehingga menciptakan kesempatan bagi banyak individu untuk memulai usaha. Keberadaan UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menjadi pendorong inovasi dan kreativitas lokal. UMKM memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan menyediakan barang serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat penjelasan mengenai: (a) untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pembangunan ekonomi nasional harus berlandaskan

pada prinsip demokrasi ekonomi, (b) sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPRRI/1998 mengenai Politik Ekonomi untuk mendukung Demokrasi Ekonomi, penguatan UMKM sangat diperlukan mengingat perannya yang vital dalam ekonomi masyarakat, serta potensi dan kontribusinya yang strategis dalam membangun struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang dan adil, (c) penguatan UMKM harus dilakukan secara komprehensif, maksimal, dan berkelanjutan dengan menciptakan iklim yang mendukung, memberikan peluang usaha, serta memberikan dukungan dan perlindungan untuk pengembangan usaha, agar UMKM dapat meningkatkan kontribusi dan potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2022, data menunjukkan distribusi unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berdasarkan sektor industri yang dijalani. Mayoritas UMKM beroperasi di sektor makanan, dengan total unit mencapai 1.592.318. Sektor pakaian jadi berada di posisi kedua dengan 594.912 unit, sementara sektor kayu serta produk dari kayu dan gabus mencakup 608.531 unit. Sektor lainnya menunjukkan variasi jumlah unit UMKM, termasuk sektor farmasi, peralatan listrik, serta jasa reparasi dan pemasangan mesin (Ahdiat: 2022). Data ini mencerminkan keragaman jenis usaha UMKM di Indonesia, dengan penekanan khusus pada sektor makanan dan pakaian. Sektor kayu dan produk kayu juga memberikan kontribusi yang signifikan. Informasi ini memberikan gambaran tentang struktur UMKM di Indonesia serta distribusi kegiatan ekonomi di berbagai sektor pada tahun 2022. Selain itu, data dari Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa total UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit, yang mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di negara ini. Angka ini menegaskan posisi penting UMKM dalam struktur ekonomi Indonesia.

Sebagai entitas bisnis yang tersebar luas dan mendominasi jumlah, UMKM menjadi fondasi utama perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak hanya sebatas nilai ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama dalam penyediaan lapangan kerja. Data menunjukkan bahwa UMKM menyerap sekitar 97% dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia. Ini mencerminkan dampak sosial yang signifikan, karena UMKM menyediakan pekerjaan bagi jutaan orang di seluruh negeri. Keberadaan UMKM tidak hanya terkait dengan aspek finansial, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat. UMKM sering kali menjadi pilihan utama bagi individu atau kelompok yang ingin meraih kemandirian ekonomi. Mereka memberikan peluang bagi orang-orang untuk memulai usaha, mengasah keterampilan, dan meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah pun menyadari betapa krusialnya peran UMKM dalam perekonomian nasional (Lubis & Salsabila: 2024).

UMKM yang memiliki risiko menengah dan tinggi diharuskan untuk mendapatkan sertifikat standar produk atau standar usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah menerima Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah berkewajiban untuk mendampingi pelaku UMKM melalui bimbingan teknis, konsultasi, dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman mengenai standar nasional Indonesia dan sertifikasi halal bagi UMKM yang baru memiliki NIB. Dalam proses pengajuan izin, pelaku UMKM tidak dikenakan biaya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 PP No. 7 Tahun 2021. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi mengenai persyaratan perizinan, prosedur pengajuan, dan penghapusan biaya izin. Asosiasi UMKM Indonesia menyatakan bahwa izin usaha merupakan salah satu metode bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dari masyarakat, dan peran izin usaha ini tetap sangat relevan hingga saat ini. Fungsi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah mencakup aspek pendapatan, perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan.

Dengan adanya izin untuk UMKM, usaha mereka akan terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, sehingga pelaku usaha bisa merasa lebih nyaman dan aman. Izin ini juga penting untuk meningkatkan nilai produksi, menyediakan barang dan jasa, serta menciptakan lapangan kerja. Selain itu, UMKM akan lebih mudah mempromosikan usaha di tingkat nasional dan internasional. Proses pengajuan pinjaman dari bank pun menjadi lebih gampang, dan ada lebih banyak informasi yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan. Legalitas usaha sangat krusial untuk pembangunan ekonomi nasional, berfungsi sebagai identitas yang menunjukkan karakteristik dan data usaha yang ada di Indonesia. Izin usaha memberikan pengakuan resmi kepada badan usaha, sehingga masyarakat dapat mengenali keberadaan mereka.

Legalitas usaha harus sesuai dengan peraturan yang ada agar UMKM mendapatkan perlindungan hukum, berfungsi sebagai payung hukum melalui dokumen resmi seperti izin usaha. Dalam operasional UMKM, perizinan sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha, memperluas, atau mengembangkan bisnis, serta memberikan formalitas yang menciptakan kepercayaan di antara calon mitra dan pemangku kepentingan. Selain itu, perizinan juga berfungsi untuk mencegah praktik pungutan liar (Wardani, 2017). UMKM perlu memiliki bukti legalitas usaha, seperti surat izin usaha, tanda pendaftaran, atau bukti pendataan. Dengan adanya perizinan dan kemudahan dalam prosesnya, pelaku UMKM akan mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang mendukung terciptanya negara yang sejahtera. Perlindungan dan pemberdayaan ini sangat penting agar UMKM dapat bersaing di level nasional dan internasional.

Dalam menjalankan usaha, pelaku UMKM sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kebutuhan untuk bekerja sama dengan pihak lain yang memerlukan dukungan hukum agar kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Jika terjadi konflik, perizinan usaha memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya. Selain itu, izin usaha memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa UMKM beroperasi sesuai peraturan, aman, dan terarah. Masyarakat sebagai konsumen cenderung lebih mempercayai pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas usaha. Dengan adanya izin atau legalitas, produk yang ditawarkan oleh pelaku UMKM terjamin aman dan halal, sehingga konsumen tidak ragu untuk melakukan pembelian. Ketika semakin banyak konsumen memilih produk dari UMKM, pelaku UMKM akan meraih keuntungan dan kesejahteraan. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa perizinan usaha memberikan perlindungan dan pemberdayaan secara langsung, serta berkontribusi pada penciptaan negara yang sejahtera. Dampak positif dari negara yang sejahtera adalah terjaminnya hak asasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Lubis, 2020).

Agar sektor UMKM dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki legalitas usaha yang jelas. Banyak pelaku UMKM yang masih beranggapan bahwa perizinan hanya penting untuk perusahaan besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan aspek legalitas ini. Selain itu, terdapat pandangan bahwa proses pengurusan izin usaha itu rumit dan memakan waktu. Izin usaha merupakan keputusan administratif dari pemerintah yang memberikan otorisasi untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya dilarang, sehingga menjadikannya sah dan legal. Dengan adanya izin, UMKM dapat berkontribusi positif terhadap efisiensi ekonomi, terutama dalam hal pendapatan asli daerah, pendapatan negara, dan pendorong investasi. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur, sehingga aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tujuan dari perizinan ini adalah untuk mendukung kegiatan pembangunan yang konstruktif.

Pemerintah juga diwajibkan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dengan

memberikan pendampingan dan pendaftaran kepada pelaku UMKM. Pendampingan dan pendaftaran ini dilakukan melalui identifikasi serta pemetaan UMKM berdasarkan kategori risiko, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Pelaku UMKM yang mengajukan izin usaha berhak menerima Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk kategori risiko rendah, hanya NIB yang diperlukan, sedangkan bagi yang berisiko menengah dan tinggi, NIB harus disertai dengan sertifikat standar. UMKM yang tergolong dalam risiko tinggi wajib memiliki NIB dan izin.

B. Bagaimana Keputusan Fiktif Positif Mempengaruhi Iklim Investasi Bagi UMKM di Kota Kota Besar Indonesia

Mekanisme fiktif positif dalam UU Cipta Kerja merupakan langkah penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi dan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih cepat mendapatkan izin yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Hal ini sangat relevan mengingat banyaknya hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam proses perizinan yang sering kali panjang dan rumit. Salah satu keuntungan utama dari mekanisme fiktif positif adalah kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha. Proses perizinan yang cepat dan efisien sangat penting bagi UMKM, yang sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. Dengan adanya ketentuan ini, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka tanpa terjebak dalam proses perizinan yang memakan waktu.

Kepastian hukum yang diberikan oleh mekanisme fiktif positif juga menjadi faktor kunci dalam menarik investasi. Pelaku usaha cenderung lebih berani berinvestasi jika mereka merasa aman dan yakin bahwa izin yang mereka butuhkan akan diperoleh dengan cepat. Hal ini menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya kepastian hukum, UMKM dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih baik. Ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan daya saing di pasar dan berinovasi dalam produk dan layanan yang mereka tawarkan. Namun, meskipun ada keuntungan yang jelas, mekanisme fiktif positif juga membawa risiko yang perlu diperhatikan.

Salah satu risiko yang mungkin muncul adalah potensi ketidaksesuaian dengan kapasitas pemerintah dalam melakukan verifikasi data lapangan. Jika izin diberikan tanpa verifikasi yang memadai, hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini dapat merugikan UMKM, terutama jika mereka berinvestasi di lokasi yang tidak sesuai. Masalah ini dapat mengakibatkan sanksi atau pembongkaran usaha, yang tentu saja akan merugikan pelaku usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses verifikasi tetap dilakukan meskipun ada mekanisme fiktif positif. Di sisi lain, UMKM yang beroperasi di kawasan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat merasakan dampak positif dari percepatan izin yang diberikan untuk proyek-proyek tersebut.

Dukungan pemerintah dalam mempercepat proses perizinan di kawasan strategis membuka peluang bagi UMKM untuk berkolaborasi dalam rantai pasokan proyek besar. Keterlibatan dalam proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan pendapatan UMKM, tetapi juga memberikan akses untuk terlibat dalam inisiatif yang lebih menguntungkan. Selain itu, kolaborasi dengan proyek besar memberikan pengalaman dan pengetahuan berharga, meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar. Keputusan fiktif positif, jika disertai pengawasan yang memadai, dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi

UMKM. Keberhasilan mekanisme ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana UMKM berperan sebagai motor penggerak perekonomian. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Jika diimplementasikan secara efektif, mekanisme fiktif positif akan memberikan manfaat bagi semua pihak dan menciptakan ekosistem yang sehat bagi perkembangan ekonomi. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan fiktif positif secara langsung berdampak pada iklim investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota-kota besar Indonesia. Mekanisme ini, yang memungkinkan permohonan izin dianggap disetujui ketika otoritas tidak memberikan respons dalam waktu tertentu, memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Kepastian ini sangat penting, terutama di kota-kota besar dengan birokrasi yang cenderung kompleks. Dengan adanya kepastian waktu untuk proses perizinan, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan. Keputusan ini juga berdampak positif bagi investor. Iklim investasi menjadi lebih kondusif karena risiko birokrasi yang sering kali menjadi hambatan dapat diminimalisir. Para investor lebih tertarik untuk menanamkan modal di sektor UMKM, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, di mana UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian. Selain itu, keputusan fiktif positif meningkatkan kepercayaan investor terhadap regulasi yang ada, karena mereka dapat memperkirakan kapan usaha yang didanai akan mendapatkan izin resmi.

Namun, keputusan fiktif positif juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak yang terkait dengan mekanisme ini. Banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari bahwa mereka dapat menggunakan keputusan fiktif positif untuk mempercepat proses perizinan. Ketidaktahuan ini membuat mereka terjebak dalam birokrasi yang berlarut-larut, sehingga manfaat dari keputusan ini belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh pelaku usaha. Selain itu, terdapat risiko penyalahgunaan. Ketika pengawasan terhadap penerapan keputusan fiktif positif kurang ketat, ada kemungkinan izin usaha dapat dikeluarkan tanpa memenuhi persyaratan yang seharusnya. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas izin yang dikeluarkan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor di kemudian hari. Jika tidak dikelola dengan baik, penyalahgunaan ini dapat merusak kepercayaan investor terhadap mekanisme perizinan di Indonesia.

Di sisi lain, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan fiktif positif berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk mempercepat proses perizinan tanpa mengorbankan kualitas dan legalitas izin yang dikeluarkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap izin yang dianggap sah melalui mekanisme ini tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, investor dapat tetap percaya bahwa setiap izin yang diterbitkan telah melalui proses yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keberhasilan keputusan fiktif positif dalam menciptakan iklim investasi yang baik juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas administrasi. Tanpa peningkatan kapasitas, keputusan ini hanya akan menambah beban birokrasi tanpa memberikan solusi jangka panjang. Reformasi birokrasi yang lebih menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan fiktif positif benar-benar berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mempercepat proses perizinan.

Selain reformasi birokrasi, langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan investor terhadap mekanisme keputusan fiktif positif juga penting. Pemerintah dapat mengadakan kampanye sosialisasi yang lebih intensif untuk

memastikan bahwa seluruh pelaku UMKM memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan perizinan. Dengan pemahaman yang lebih baik, UMKM dapat lebih proaktif dalam memanfaatkan mekanisme ini untuk mempercepat pengembangan usaha mereka. Di kota-kota besar, di mana jumlah pelaku UMKM sangat tinggi, keputusan fiktif positif memiliki potensi besar untuk memperbaiki iklim investasi. Namun, agar potensi ini dapat terwujud sepenuhnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor. Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas layanan publik, sedangkan pelaku usaha dan investor perlu lebih aktif dalam mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan yang ada.

Keputusan fiktif positif adalah situasi di mana informasi yang tampak baik mengenai perkembangan UMKM sebenarnya tidak mencerminkan realitas di lapangan. Dalam konteks ini, data atau laporan terlihat menggambarkan UMKM berkembang pesat, padahal masih banyak kendala yang dihadapi. Dampak dari keputusan fiktif positif ini bisa sangat signifikan terhadap iklim investasi, terutama di kota-kota besar seperti Baubau, di mana UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Bagi investor, kepercayaan adalah faktor penting dalam pengambilan keputusan. Jika informasi yang diterima mereka menggambarkan situasi UMKM sebagai berkembang baik, sementara kondisi lapangan sebenarnya tidak sebaik itu, hal ini dapat merusak kepercayaan mereka. Investor yang tertarik untuk menanamkan modal akan merasa ragu karena mereka mungkin menemukan banyak tantangan yang tidak terungkap dalam laporan resmi, seperti masalah akses pasar, infrastruktur, atau modal.

Di Baubau, meskipun upaya pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi dalam mendukung UMKM sudah ada, seperti melalui debirokratisasi atau penyederhanaan prosedur perizinan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih menurun. Ini merupakan sinyal bahwa meskipun ada kebijakan yang terlihat memudahkan, ada masalah struktural yang lebih dalam yang belum terselesaikan. Debirokratisasi, secara teori, memang menjadi solusi untuk mengurangi hambatan administratif yang sering membebani UMKM. Langkah-langkah seperti mempercepat proses perizinan dan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan dukungan modal tentu merupakan kemajuan. Namun, jika dampaknya hanya terlihat pada level administrasi tanpa adanya perbaikan nyata dalam akses modal dan pasar, maka kemajuan ini hanya ada di permukaan.

Salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM di Baubau adalah kesulitan dalam mengakses modal yang memadai. Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan berupa peralatan produksi, kendala dalam pemasaran produk tetap menghambat perkembangan UMKM. Tanpa dukungan untuk akses pasar dan tambahan modal, pertumbuhan mereka terhambat. Prosedur administratif yang lebih sederhana tidak cukup untuk mengatasi tantangan mendasar ini. Selain itu, infrastruktur yang terbatas juga menjadi penghalang. Akses terhadap teknologi, distribusi produk, dan fasilitas pendukung lainnya sering kali tidak memadai, sehingga UMKM kesulitan bersaing di pasar yang lebih luas. Meskipun perizinan telah disederhanakan, masalah infrastruktur yang tidak terselesaikan akan menghalangi pemanfaatan kebijakan debirokratisasi secara optimal.

Keputusan fiktif positif yang menggambarkan perkembangan UMKM di Baubau bisa menyesatkan investor. Data yang menunjukkan kemajuan dapat menarik perhatian, tetapi setelah berinvestasi, mereka mungkin akan menyadari banyak tantangan yang belum teratasi. Ketidakcocokan antara laporan positif dan kondisi riil dapat menimbulkan ketidakpercayaan, membuat investor enggan melanjutkan investasi. Pemerintah perlu menyadari bahwa debirokratisasi tidak hanya soal menyederhanakan proses, tetapi juga memberikan dukungan substansial. Ini mencakup akses modal yang lebih luas, perbaikan infrastruktur, dan penciptaan koneksi yang lebih baik antara UMKM dan pasar.

Jika pemerintah terus mengandalkan laporan positif tanpa melihat kondisi lapangan, ini bisa menciptakan kesan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif, padahal dampaknya jauh dari harapan. Investor yang menyadari ketidaksesuaian ini mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap iklim investasi di Baubau. Meskipun ada inisiatif digital untuk mendukung UMKM, seperti penggunaan grup WhatsApp, ini hanya solusi sementara. Masalah mendasar, seperti pemasaran produk dan akses modal, tetap harus diatasi dengan dukungan nyata dari pemerintah. Jika situasi ini dibiarkan, UMKM dapat terjebak dalam stagnasi, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan kontribusi mereka terhadap PDRB yang semakin menurun.

Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah harus lebih transparan dalam menyampaikan kondisi riil UMKM. Langkah debirokratisasi memang diperlukan, tetapi harus dibarengi dengan kebijakan lain yang dapat memperkuat daya saing UMKM. Misalnya, pemerintah bisa memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas, memperbaiki jaringan distribusi, dan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan UMKM. Investor yang tertarik pada sektor UMKM tidak hanya akan melihat laporan-laporan yang optimistis, tetapi juga akan menilai kondisi lapangan. Mereka akan tertarik jika pemerintah mampu menunjukkan bahwa selain mengurangi hambatan administratif, ada dukungan nyata yang diberikan untuk mengatasi tantangan-tantangan struktural yang dihadapi UMKM. Dengan begitu, mereka akan merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modal.

KESIMPULAN

Bahwa penerapan keputusan fiktif positif memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai kota besar di Indonesia. Prinsip fiktif positif, yang memungkinkan permohonan perizinan dianggap disetujui jika tidak ada tanggapan dari pihak berwenang dalam waktu yang ditentukan, bertujuan untuk mempercepat proses birokrasi yang sering menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM. UMKM secara umum memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar tetapi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pelaku UMKM kerap menghadapi berbagai kendala dalam operasional bisnis mereka, terutama terkait proses perizinan. Proses perizinan yang panjang, birokrasi yang rumit, dan kurangnya kepastian hukum menjadi masalah utama yang menghambat perkembangan UMKM secara optimal. Di sinilah keputusan fiktif positif hadir sebagai solusi untuk memberikan kepastian dan mempercepat proses administrasi.

Keputusan fiktif positif memiliki dampak positif dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung bagi UMKM. Dengan memberikan kepastian hukum, pelaku usaha dapat fokus mengembangkan bisnis tanpa terjebak dalam proses administrasi yang rumit. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di sektor UMKM, karena perizinan dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan keputusan ini. Jika perizinan dianggap sah hanya karena tidak ada tanggapan dari pihak berwenang, tanpa verifikasi yang tepat, dapat muncul masalah, seperti ketidaksesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang. Selain itu, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha perlu ditingkatkan agar mereka memahami cara memanfaatkan mekanisme ini dengan baik. Untuk memaksimalkan manfaat keputusan fiktif positif, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan, memperbaiki sosialisasi kepada pelaku UMKM, dan melakukan reformasi birokrasi agar proses perizinan lebih transparan dan akuntabel. Keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai tujuannya untuk mempercepat dan mempermudah perizinan, sementara pelaku usaha dan masyarakat perlu lebih aktif dalam memahami regulasi yang berlaku agar dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dengan langkah-langkah yang tepat, keputusan fiktif positif dapat menjadi salah satu alat penting dalam mendorong perkembangan UMKM di Indonesia, memperkuat kemandirian ekonomi nasional, dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Walaupun keputusan fiktif positif memiliki peluang yang besar dalam mendorong perkembangan UMKM, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar hasilnya bisa lebih maksimal. Peningkatan pengawasan, edukasi kepada masyarakat, serta reformasi birokrasi yang konsisten menjadi faktor utama untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan UMKM sebagai salah satu bagian utama dalam perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Jurnal :

Ade Saputra, I., & Purna, Z. A. (2024). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Pendekatan Debirokratisasi Untuk Pengembangan Umkm Di Kota Baubau. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(1), 1–20. <https://doi.org/10.33509/jan.v30i1.2811>

Andi, A. (2022). Bias Kewenangan Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Ranah Perizinan Pasca Terbitnya Undang Undang Cipta Kerja. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 117. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6323>

Arniti, N. K. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(8), 265–270.

Aschari, M., & Harjiyatni, F. R. (2017). Kajian Tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Keputusan Fiktif Positif. *Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 25–57.

Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.13583>

Lumban Tungkup, D., Wira Perdana, F., Irwan, I., Surnata, S., & Siswanto, W. (2022). Implikasi Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(08), 1168–1178. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i8.664>

Maria Dika Puspita Sari, A. G. P. (2022). Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(1), 1–7.

Noor, A., Galih Prabowo, R., Kusnadi, E., Diansyah, Y., & Prabowo, R. G. (2023). Pemberian Izin Berbasis Elektronik (Online Submite Sistem) Berdasarkan Prinsip Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. *Unes Law Review*, 5(4), 2588–2598. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>

Rodding, B. (2017). Keputusan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18328>

- Roychan, W. (2023). Konsep Dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 69–90. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.140>
- Simanjuntak, E. (2018). Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 301. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.250>
- Suhariyanto, B. (2018). Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan Tun Dan Pengadilan Tipikor / Interception of Justice Authority of Discretion Abuse Between Administration Court and Corruption Courts. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 213. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.213-236>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(11), 24–39. <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/506>
- Wardani, S. (2017). Kebijakan Perizinan Pengembangan Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan Di Era Liberalisasi Ekonomi Global. *Jurnal Publikasi Ilmiah*, 1, 1–38. www.penerbit.medsan.co.id
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.